

BAB V

PENUTUP

5.2 Saran

1. Diharapkan pemerintah setempat mampu mengalokasikan dana transfer pusat secara proporsional untuk sektor-sektor yang mendorong peningkatan IPM seperti kesehatan (Puskesmas, BPJS daerah), pendidikan (beasiswa daerah, sekolah terpencil), dan ekonomi produktif (UMKM, pertanian keluarga).
2. Pemerintah daerah perlu menetapkan target PAD yang realistis dan progresif, bukan asal rendah agar terlihat efektif. Target PAD harus memperhatikan potensi ekonomi riil dan kebutuhan pembiayaan pembangunan social
3. Diharapkan pemerintah lebih mampu meningkatkan porsi PAD dalam struktur APBD agar kemandirian fiskal daerah meningkat dan bisa berinovasi dalam pengentasan kemiskinan serta peningkatan pendidikan dan kesehatan. Serta melakukan peningkatan kapasitas SDM aparatur pengelola keuangan daerah agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran.
4. Penelitian ini masih perlu dan harus dikembangkan kembali, karena masih banyak aspek-aspek yang apat dikaji lebih lanjut dalam keuangan daerah khususnya untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Pulau Madura.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Analisis Pengaruh rasio Ketergantungan keuangan Daerah, rasio Efektivitas PAD, dan rasio derajat desentralisasi fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten di pulau madura dalam kurun waktu 2011 – 2023 sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian menunjukkan secara parsial Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Pulau Madura.
Ketergantungan fiskal mengindikasikan lemahnya kapasitas fiskal lokal dan keterbatasan fleksibilitas anggaran. Ini berdampak pada rendahnya efektivitas penganggaran berbasis kebutuhan lokal, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat.
2. Hasil Penelitian menunjukkan secara parsial Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Pulau Madura.
Hal Ini bisa terjadi karena meskipun PAD dikelola secara efektif (tinggi dibanding target), jumlahnya tetap kecil secara nominal dan kurang mampu mendorong transformasi besar dalam sektor pendidikan, kesehatan, atau layanan publik lainnya.
3. Hasil Penelitian menunjukkan secara parsial Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Pulau Madura.
RDDF yang tinggi mencerminkan kemandirian fiskal dan kapasitas daerah dalam mengatur belanja publik. Ini meningkatkan efektivitas

alokasi anggaran sesuai kebutuhan lokal, serta menciptakan inovasi kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Pulau Madura.

Ketiga indikator kinerja keuangan daerah tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi dalam perkembangan IPM, sehingga penting untuk dipertimbangkan secara holistik dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.